



PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

RENCANA KERJA TAHUN 2024



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 dapat diselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini dimaksudkan sebagai format dokumen resmi Rencana Kerja Tahunan Instansi Pemerintah yang berisikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 ini, diperlukan data dan informasi berkenaan dengan capaian kinerja yang dihitung 3 tahun terakhir. Mengingat aplikasi penganggaran saat ini sudah menerapkan anggaran berbasis kinerja, sehingga perlu koordinasi yang kuat antar Bidang guna mengevaluasi capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu Rencana Kerja (Renja) BPKAD Tahun 2024 juga mengevaluasi sejauh mana keberhasilan program kegiatan yang dilakukan pada tahun yang lalu serta menganalisis kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan selesainya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 ini, diharapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan dan sasaran yang dirumuskan dapat tercapai.

Demikianlah penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang,
Kepala,



H. Akhmad Mukhlis, SE., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196406211993031004

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2023	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra BPKAD Provinsi Sumatera Selatan	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	24
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan	27
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	30
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .	51
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	63
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1 Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	66
BAB V PENUTUP	83

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1	Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.....	3
----------	--	---

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Pencapaian Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah s/d Tahun 2023	9-23
Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan...	25-26
Tabel T-C.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	31-50
Tabel T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Provinsi Sumatera Selatan.....	52-58
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	64-65
Tabel 4.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan	71-82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan ini, diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif, perlunya *guideline* dalam melaksanakan penganggaran dan pengelolaannya harus dilakukan secara terarah serta terpadu dengan pembangunan nasional sehingga pembangunan tersebut efektif, efisien dan sinergis. Hal ini juga diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan.

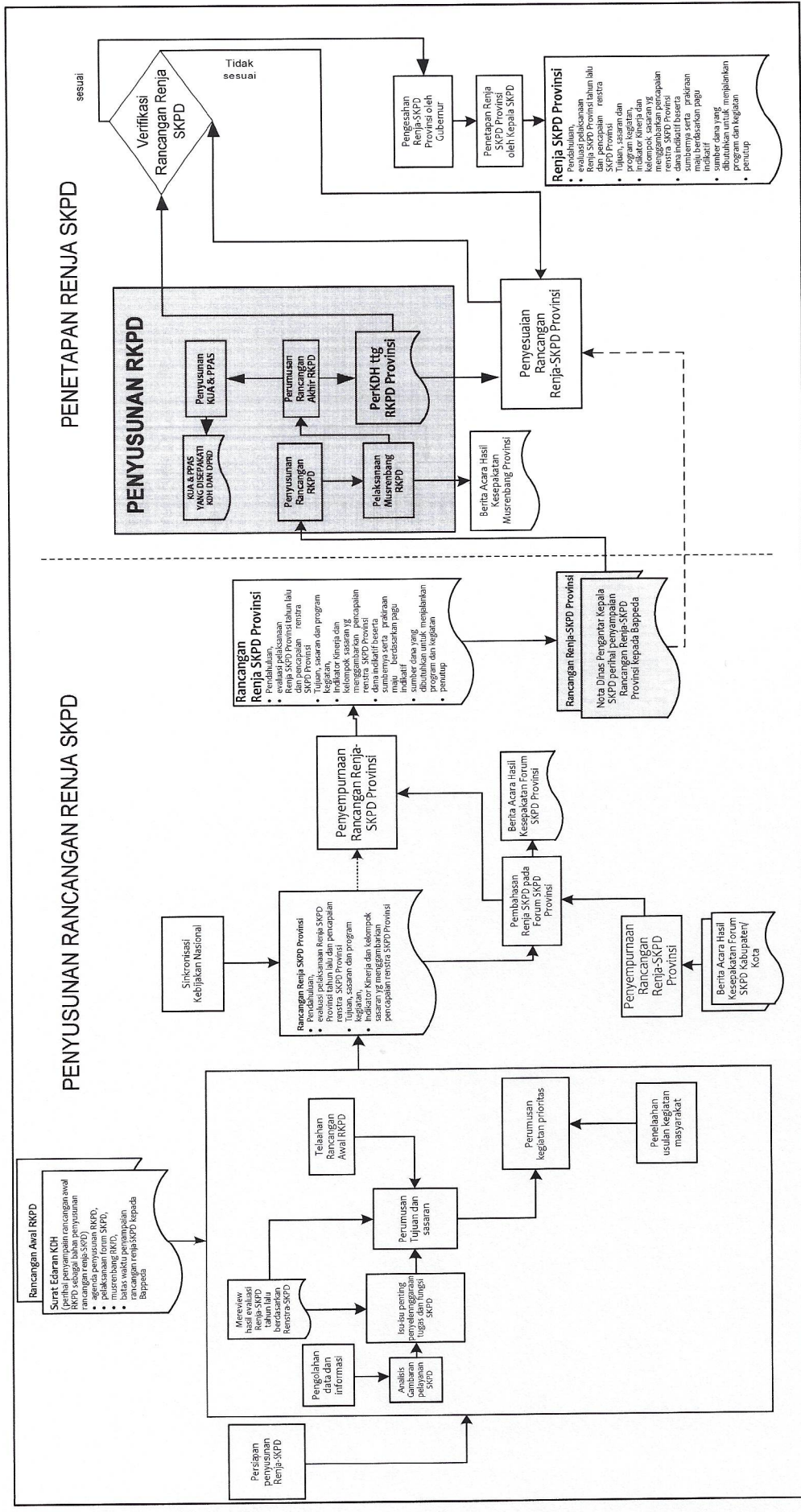
Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan terhadap Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan Daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Renja Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Penyusunan Rancangan Awal Renja Tahun 2024 berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026, hasil evaluasi hasil Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun lalu.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk terwujudnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang terarah, sistematis dan pencapaian kinerja yang optimal maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan merumuskan langkah-langkah strategis yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tiap tahunnya. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut disusun dalam bentuk dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Pada prinsipnya, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mengacu pada dokumen Rencana Strategis (Renstra), dimana didalamnya mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini dilakukan agar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memiliki kesesuaian, tidak menyimpang dan dapat berjalan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 yang telah ditetapkan sehingga tujuan, sasaran dan target pembangunan dapat direalisasikan secara optimal.

Gambar 1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja OPD Provinsi



1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4);
- f. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- q. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- r. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- s. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- t. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 5);
- u. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 13);
- v. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 12);
- w. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 5);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024, antara lain:

a. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Tahun 2024 adalah untuk merumuskan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai pedoman:

- 1) Pelaksanaan pelayanan perangkat daerah;
- 2) Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan ;
- 3) Penyusunan RKA-SKPD

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Laporan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Bab. I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

Bab. II Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023.

Berisikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPKAD Tahun 2023 dan capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, reviu terhadap rancangan awal RKPD.

Bab. III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Menjelaskan telaahan terhadap kebijakan nasional dan prioritas pembangunan nasional, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Bab. IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan rencana kerja dan pendanaan, program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Bab. V Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 dan Capaian Renstra BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan pemerintahan pada urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang didalamnya terdapat bidang Sekretariat, Perencanaan Anggaran Daerah, Perbendaharaan Daerah, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023. Setiap program selanjutnya disusun kegiatan-kegiatan yang mendukung. Program dan kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka menunaikan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, setiap program dan kegiatan dibebani suatu indikator kinerja. Program dibebani indikator kinerja yang bersifat hasil (*outcome*) sedangkan kegiatan dibebani indikator kinerja yang bersifat keluaran (*output*). Target capaian kinerja ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk lima tahun dan dijabarkan dalam target kinerja tahunan dalam Rencana Kerja (Renja).

Hasil pengukuran capaian kinerja tiap tahun atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Tabel T-C.29 berikut menyajikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan pencapaian Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023.

Tabel TC. 29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DAN PENCAPAIAN RENSTRA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH S/D TAHUN 2023

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, DAN KEGIATAN SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (AKHIR) RENSTRA OPD TAHUN 2023	REALISASI KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET REALISASI PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2023 (n-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 (n-2)	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2023 (n-2)	TINGKAT REALISASI (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi								
5.02.01.1.01	i Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					100%			100%
5.02.01.1.01.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja, Revisi Renstra yang disusun	2 Buku	2 Buku	2 Buku	2 Buku		2 Buku	2 Buku	
5.02.01.1.01.02	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
5.02.01.1.01.04	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen
5.02.01.1.01.04	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen
5.02.01.1.01.05	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen
5.02.01.1.01.06	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Lakip yang disusun	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku		1 Buku	1 Buku
5.02.01.1.01.07	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah kinerja perangkat daerah yang dievaluasi	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan
5.02.01.1.02	ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					100%		100%
5.02.01.1.02.01	8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	110 ASN	110 ASN	110 ASN	110 ASN		110 ASN	110 ASN
5.02.01.1.02.02	9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi pelaksanaan tugas ASN yang tersedia	5 ASN dan 85 Non ASN	5 ASN dan 85 Non ASN	5 ASN dan 85 Non ASN	5 ASN dan 85 Non ASN		5 ASN dan 85 Non ASN	5 ASN dan 85 Non ASN

1																			
5.02.01.1.02.03	10	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	3	Jumlah jasa administrasi keuangan	3 orang bendahara, 1 orang PPK, dan 2 orang verifikasi	6	3 orang bendahara, 1 orang PPK, dan 2 orang verifikasi	7	3 orang bendahara, 1 orang PPK, dan 2 orang verifikasi	8	3 orang bendahara, 1 orang PPK, dan 2 orang verifikasi	9	3 orang bendahara, 1 orang PPK, dan 2 orang verifikasi	10=(5+7+9)	3 orang bendahara, 1 orang PPK, dan 2 orang verifikasi	11=(10/4)	3 orang bendahara, 1 orang PPK, dan 2 orang verifikasi		
5.02.01.1.02.04	11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4	Jumlah Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang terkoordinasi	10 Dokumen	5	10 Dokumen	6	10 Dokumen	7	10 Dokumen	8	10 Dokumen	9	10 Dokumen	10	10 Dokumen		
5.02.01.1.02.05	12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang terkoordinasi	1 Dokumen	5	1 Dokumen	6	1 Dokumen	7	1 Dokumen	8	1 Dokumen	9	1 Dokumen	10	1 Dokumen		
5.02.01.1.02.06	13	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	4	Jumlah Laporan Hasil Tanggapan Pemeriksaan dan Verifikasi Hibah	3 Laporan & 17 Kab/ Kota	5	3 Laporan & 17 Kab/ Kota	6	3 Laporan & 17 Kab/ Kota	7	3 Laporan & 17 Kab/ Kota	8	3 Laporan & 17 Kab/ Kota	9	3 Laporan & 17 Kab/ Kota	10	3 Laporan & 17 Kab/ Kota		
5.02.01.1.02.07	14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	3 Laporan	5	3 Laporan	6	3 Laporan	7	3 Laporan	8	3 Laporan	9	3 Laporan	10	3 Laporan		
5.02.01.1.02.08	15	Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	5	1 Laporan	6	1 Laporan	7	1 Laporan	8	1 Laporan	9	1 Laporan	10	1 Laporan		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
5.02.01.1.05.02	21	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	300 Org/Stel	300 Org/Stel	300 Org/Stel	300 Org/Stel		300 Org/Stel	300 Org/Stel
5.02.01.1.05.03	22	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Analisa Jabatan, Evaluasi Jabatan dan Beban Kerja	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan
5.02.01.1.05.05	23	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Kinerja Pegawai	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan
5.02.01.1.05.09	24	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang dikirim mengikuti Diklat	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang		15 Orang	15 Orang
5.02.01.1.06	V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah					100%		100%
5.02.01.1.06.01	25	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	41 Jenis	41 Jenis	41 Jenis	41 Jenis		41 Jenis	41 Jenis
5.02.01.1.06.02	26	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Mesin Scanner, Printer, Komputer, Laptop, Alat Penghancur Kertas	Mesin Scanner, Printer, Komputer, Laptop, Alat Penghancur Kertas	Mesin Scanner, Printer, Komputer, Laptop, Alat Penghancur Kertas	Mesin Scanner, Printer, Komputer, Laptop, Alat Penghancur Kertas		Mesin Scanner, Printer, Komputer, Laptop, Alat Penghancur Kertas	Mesin Scanner, Printer, Komputer, Laptop, Alat Penghancur Kertas

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
5.02.01.1.06.10	34	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Keterbukaan Informasi Publik	Sosialisasi PPID di Lingkungan BPKAD Prov. Sumsel	Sosialisasi PPID di Lingkungan BPKAD Prov. Sumsel	Sosialisasi PPID di Lingkungan BPKAD Prov. Sumsel	Sosialisasi PPID di Lingkungan BPKAD Prov. Sumsel	Sosialisasi PPID di Lingkungan BPKAD Prov. Sumsel	Sosialisasi PPID di Lingkungan BPKAD Prov. Sumsel	Sosialisasi PPID di Lingkungan BPKAD Prov. Sumsel	
5.02.01.1.06.11	35	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpelihara	7 Aplikasi	7 Aplikasi	7 Aplikasi	7 Aplikasi	7 Aplikasi	7 Aplikasi	7 Aplikasi	
5.02.01.1.08	vii	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100%			100%
5.02.01.1.08.01	36	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang dikirim	6.000 Surat	6.000 Surat	6.000 Surat	6.000 Surat	6.000 Surat	6.000 Surat	6.000 Surat	
5.02.01.1.08.02	37	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan komunikasi, sumberdaya air, dan listrik	6 Rek Listrik, 6 Rek Telepon, 6 Rek Air Dan 9 Rek Internet	6 Rek Listrik, 6 Rek Telepon, 6 Rek Air Dan 9 Rek Internet	6 Rek Listrik, 6 Rek Telepon, 6 Rek Air Dan 9 Rek Internet	6 Rek Listrik, 6 Rek Telepon, 6 Rek Air Dan 9 Rek Internet	6 Rek Listrik, 6 Rek Telepon, 6 Rek Air Dan 9 Rek Internet	6 Rek Listrik, 6 Rek Telepon, 6 Rek Air Dan 9 Rek Internet	6 Rek Listrik, 6 Rek Telepon, 6 Rek Air Dan 9 Rek Internet	
5.02.01.1.09	viii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara					100%			100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.01.1.09.01	38	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terpenuhi	17 R4, 16 R2	17 R4, 16 R2	17 R4, 16 R2	17 R4, 16 R2		17 R4, 16 R2	17 R4, 16 R2
5.02.01.1.09.02	39	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpenuhi	4 R4, 4 R2	4 R4, 4 R2	4 R4, 4 R2	4 R4, 4 R2		4 R4, 4 R2	4 R4, 4 R2
5.02.01.1.09.06	40	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	4 Jenis Peralatan Dan Mesin Lainnya	4 Jenis Peralatan Dan Mesin Lainnya	4 Jenis Peralatan Dan Mesin Lainnya	4 Jenis Peralatan Dan Mesin Lainnya		4 Jenis Peralatan Dan Mesin Lainnya	4 Jenis Peralatan Dan Mesin Lainnya
5.02.01.1.09.09	41	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang direhab yang terpelihara	2 Unit Gedung Kantor, 1 Gudang Arsip	2 Unit Gedung Kantor, 1 Gudang Arsip	2 Unit Gedung Kantor, 1 Gudang Arsip	2 Unit Gedung Kantor, 1 Gudang Arsip		2 Unit Gedung Kantor, 1 Gudang Arsip	2 Unit Gedung Kantor, 1 Gudang Arsip
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		APBD yang Tepat Waktu							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.02.1.01	I	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Daerah					100%		100%
5.02.02.1.01.01	42	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
5.02.02.1.01.02	43	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen
5.02.02.1.01.07	44	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Raperda dan Rapergub Penjabaran APBD	100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, 100 buku Pergub, 500 RKA, 500 DPA	100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, 100 buku Pergub, 500 RKA, 500 DPA	100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, 100 buku Pergub, 500 RKA, 500 DPA	100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, 100 buku Pergub, 500 RKA, 500 DPA	100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, 100 buku Pergub, 500 RKA, 500 DPA	100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, 100 buku Pergub, 500 RKA, 500 DPA	100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, 100 buku Pergub, 500 RKA, 500 DPA
5.02.02.1.01.08	45	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Raperda dan Rapergub Penjabaran Perubahan APBD	100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, 100 buku Pergub, 500 RKA, 500 DPA	100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, 100 buku Pergub, 500 RKA, 500 DPA	100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, 100 buku Pergub, 500 RKA, 500 DPA	100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, 100 buku Pergub, 500 RKA, 500 DPA	100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, 100 buku Pergub, 500 RKA, 500 DPA	100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, 100 buku Pergub, 500 RKA, 500 DPA	100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, 100 buku Pergub, 500 RKA, 500 DPA
5.02.02.1.01.10	46	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Perda yang dihasilkan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)	
5.02.02.1.02	ii	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota					100%			100%
5.02.02.1.02.02	47	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang terlaksana	17 SK	17 SK	17 SK	17 SK		17 SK	17 SK	
5.02.02.1.02.03	48	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD Kab/kota	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD yang terlaksana	17 SK	17 SK	17 SK	17 SK		17 SK	17 SK	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.02.1.02.04	49	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	Jumlah Raperda Pertanggung jawaban APBD	17 SK	17 SK	17 SK	17 SK		17 SK	17 SK
5.02.02.1.03	iii	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					100%		100%
5.02.02.1.03.01	50	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah laporan rekonsiliasi pengelolaan kas daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan
5.02.02.1.03.04	51	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah kewajiban biaya pengelolaan dan biaya provisi	SMI	SMI	SMI	SMI		SMI	SMI
5.02.02.1.03.05	52	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Laporan Rekonsiliasi DAK Fisik dan Non Fisik	3 Laporan/ Jenis Dana Transfer	3 Laporan/ Jenis Dana Transfer	3 Laporan/ Jenis Dana Transfer	3 Laporan/ Jenis Dana Transfer		3 Laporan/ Jenis Dana Transfer	3 Laporan/ Jenis Dana Transfer

1	5.02.02.1.03.06	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		53	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Laporan Pelaksanaan Transaksi Non Tunai	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	
	5.02.02.1.03.09	54	Rekonsiliasi Data Penemuan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan intansi terkait	Jumlah Rekonsiliasi Data Penemuan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D	41 OPD	41 OPD	41 OPD	41 OPD		41 OPD	41 OPD	
	5.02.02.1.04	iv	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah					100%			100%
	5.02.02.1.04.02	55	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Laporan rekonsiliasi	12 buku dan 5 SK Kab/Kota	12 buku dan 5 SK Kab/Kota	12 buku dan 5 SK Kab/Kota	12 buku dan 5 SK Kab/Kota		12 buku dan 5 SK Kab/Kota	12 buku dan 5 SK Kab/Kota	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)	
5.02.02.1.05.03	60	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Dana Darurat dan Mendesak yang dikelola	17 Kab/Kota	17 Kab/Kota	17 Kab/Kota	17 Kab/Kota		17 Kab/Kota	17 Kab/Kota	
5.02.02.1.05.04	61	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	Jumlah Dana bagi Hasil Provinsi yang dikelola	17 Kab/Kota	17 Kab/Kota	17 Kab/Kota	17 Kab/Kota		17 Kab/Kota	17 Kab/Kota	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah								
5.02.03.1.01	VI	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah					100%			100%
5.02.03.1.01.01	62	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Biaya Umum yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	
5.02.03.1.01.03	63	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan RKBMD yang disusun	41 laporan	41 laporan	41 laporan	41 laporan		41 laporan	41 laporan	
5.02.03.1.01.05	64	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah	41 SK Gubernur Penetapan Status, 5 SK Alih Status, 10 SK Penghapusan Aset	41 SK Gubernur Penetapan Status, 5 SK Alih Status, 10 SK Penghapusan Aset	41 SK Gubernur Penetapan Status, 5 SK Alih Status, 10 SK Penghapusan Aset	41 SK Gubernur Penetapan Status, 5 SK Alih Status, 10 SK Penghapusan Aset		41 SK Gubernur Penetapan Status, 5 SK Alih Status, 10 SK Penghapusan Aset	41 SK Gubernur Penetapan Status, 5 SK Alih Status, 10 SK Penghapusan Aset	
5.02.03.1.01.07	65	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang diamankan	41 OPD	41 OPD	41 OPD	41 OPD		41 OPD	41 OPD	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dicapai dengan melaksanakan seluruh program yang diamanatkan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan termasuk dalam amanat tersebut adalah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sesuai bidang urusan yang dilimpahkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Indikator kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan terletak pada sasaran pembangunan dalam Renstra. Indikator kinerja pelayanan merupakan indikator kinerja yang bersifat hasil (*outcome*) dan menggambarkan indikator kinerja program-program yang dilaksanakan dalam mencapai sasaran pembangunan dimaksud.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan disajikan pada Tabel T-C.30, termasuk dalam analisis tersebut adalah proyeksi kinerja pelayanan tahun rencana dan satu tahun maju.

TABEL T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasio- nal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (th. n-3)	Tahun 2023 (th. n-2)	Tahun 2024 (th. n-1)	Tahun 2025 (th. n1)	Tahun 2026 (th. n+1)	Tahun 2022 (th. n-2)	Tahun 2023 (th. n-1)	Tahun 2024 (th. n1)	Tahun 2025 (th. n+1)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1	- Penetapan perda dan pergub APBD yang tepat waktu			Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	LK-SKPD TA 2023 baru akan disampaikan ke BPKAD Provinsi Sumatera Selatan pada bidang akuntansi dan pelaporan tanggal 1 Februari 2024, kemudian disampaikan ke BPK tanggal 31 Maret 2024	
	- <i>Budget Execution</i>			5% s.d 0%	5% s.d 0%	5% s.d 0%	-5% s.d 0%	-5% s.d 0%	5% s.d 0%	5% s.d 0%	-5% s.d 0%	-5% s.d 0%		
2	Persentase dokumen SPJ yang sesuai dengan aturan (Sisdur) dan tepat waktu			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Persentase kesesuaian antara aset lancar dan aset tetap dengan catatan atas laporan keuangan dan bukti dokumen			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	LK-SKPD sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan SKPD yang dikirim ke BPKAD Provinsi Sumatera Selatan melalui bidang akuntansi dan pelaporan	

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasio- nal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (th. n-3)	Tahun 2023 (th. n-2)	Tahun 2024 (th. n-1)	Tahun 2025 (th. n1)	Tahun 2026 (th. n+1)	Tahun 2022 (th. n-2)	Tahun 2023 (th. n-1)	Tahun 2024 (th. n1)	Tahun 2025 (th. n+1)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
4	- <i>Asset Management</i>			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Untuk mengetahui kondisi aset, maka setelah data aset diinput dalam SIMDA BMD, kemudian akan dilakukan cek fisik terhadap aset tersebut.	
5	Persentase tertibnya dokumen perencanaan, pelaporan, data informasi, administrasi umum, kepegawain, keuangan dan aset yang tepat waktu			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
6	Persentase APBD/APBDP Kab/Kota yang tepat waktu dan benar			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
7	Laporan Pertanggung Jawaban APBD Kab/Kota yang tepat waktu			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

Dalam upaya untuk mencapai target diatas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah menentukan strategi dan kebijakan yang kemudian dijabarkan dalam program dan kegiatan selama periode rentang waktu 2022-2025. Berdasarkan hasil yang telah dicapai selama rentang waktu tersebut menunjukkan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Pada tahun 2021, Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berhasil mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang ke-9 (sembilan) kali. Opini ini menunjukkan bahwa BPKAD Provinsi Sumatera Selatan bersama OPD terkait selalu berusaha untuk menindaklanjuti temuan-temuan BPK yang menjadi penghambat untuk mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) tersebut.

Untuk mengatasi kendala perhitungan aset daerah, BPKAD Provinsi Sumatera Selatan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengaplikasikan Sistem Manajemen Aset Daerah (SIMDA) BMD versi terbaru (2.0.7.11.R7.1) bersama OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan agar bisa menghitung penyusutan aset untuk menunjang kebijakan Akrual Basis.
- b. Melakukan perbaikan kepemilikan dan perpanjangan sertifikat untuk yang masanya sudah habis.
- c. Menginventarisasikan aset-aset daerah yang tersebar di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
- d. Mencocokkan data yang ada di OPD dengan SIMDA BMD (verifikasi aset).

Untuk menunjang Aplikasi SIPD RI dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan Bimbingan Teknik (BimTek) SIPD RI.
- b. Menerapkan data terupdate Aplikasi SIPD RI dari Kementerian Dalam Negeri.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dihadapkan pada beberapa permasalahan, terutama permasalahan terkait pelayanan dalam mencapai target kinerja sebagaimana disajikan pada Tabel T-C.30, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Adanya aset yang tidak termanfaatkan tidak dilaporkan oleh OPD.
- b. Pemakaian rumah dinas belum tertib peruntukannya.
- c. Masih kurangnya kepedulian OPD dalam pengelolaan aset daerah.
- d. Masih banyak tanah yang belum besertifikat, lokasi aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagian tersebar diwilayah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan dan masih terdapat aset tanah yang status kepemilikannya tumpang tindih dengan pihak lain.
- e. Masih ada beberapa OPD yang melakukan rehab gedung dan bangunan tetapi belum melakukan penghapusan aset, sehingga nilai penyusutan aset tidak bisa dicatat.
- f. Aplikasi koordinator pendapatan tidak ada interkoneksi dengan aplikasi keuangan, belum ada produk hukum yang mengatur masalah retribusi, hal ini menyebabkan penatausahaan pendapatan di koordinator pendapatan (Bapenda) belum valid.
- g. Masih rendahnya realisasi pencapaian setoran TP/TGR.

Permasalahan-permasalahan diatas akan segera ditindak lanjuti pada program dan kegiatan yang ada di Tahun Anggaran 2024 agar visi dan misi Gubernur Sumatera Selatan serta capaian program nasional di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dapat terwujud. Hal ini terkait dengan capaian indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah yang pelaksanaannya adalah oleh OPD-OPD sesuai pelimpahan kewenangan yang diberikan.

Tantangan (*treaths*) yang dihadapi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam pengembangan pelayanan tahun 2024, antara lain sebagai berikut :

- a. Mengimplementasikan Aplikasi Pemerintah yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dari Kementerian Dalam Negeri yaitu penyusunan anggaran tahun 2024, Penerapan anggaran berbasis kinerja untuk mencapai efisiensi penggunaan anggaran.
- b. Mendata seluruh aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- c. Melakukan inventarisasi seluruh aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- d. Optimalisasi pemanfaatan aset, sehingga bisa menambah PAD Provinsi Sumatera Selatan.

Peluang-peluang (*opportunities*) pengembangan pelayanan tahun 2024 di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, antara lain sebagai berikut:

- a. Perkembangan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) RI.
- b. Terdapat sumber-sumber pendanaan lain diluar APBD provinsi (pihak swasta) yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan daerah kearah yang lebih baik sesuai visi dan misi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026.
- c. Adanya kebijakan Pemerintah Daerah tentang peluang investasi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan
- d. Adanya peluang investasi dari pihak asing di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Sesuai uraian singkat tersebut di atas, isu penting yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2024 adalah :

- a. Bagaimana mengembangkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang berbasis teknologi informasi melalui SIPD RI.
- b. Bagaimana meningkatkan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota secara periodik.
- c. Bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- d. Bagaimana meningkatkan optimalisasi pemanfaatan aset, sehingga bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- e. Bagaimana mengembangkan SIMDA Barang Milik Daerah agar dapat mengoptimalkan inventarisasi barang.
- f. Perlunya pengintegrasian antara Sistem SIPD dengan SIMDA Barang seperti Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)

Penyusunan rancangan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi *eksisting* OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan arahan Gubernur Sumatera Selatan terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel T-C.31 berikut memberikan gambaran identifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD dibandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya.

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1				5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Tercapainya penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		114.374.310.000	I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Tercapainya penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		115.939.310.000	
	i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.490.000.000	i Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Perentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		790.600.000	
	1	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah	2 dokumen	150.000.000	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	PLG	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah	2 dokumen	150.000.000	
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	155.000.000	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PLG	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	155.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	PLG	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	150.000.000	3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	PLG	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	150.000.000
	4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	PLG	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	150.000.000	4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	PLG	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	150.000.000
	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PLG	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	155.600.000	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PLG	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	155.600.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PLG	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 laporan	730.000.000	6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PLG	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 laporan	30.000.000	
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		108.357.310.000	ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		110.622.310.000	
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PLG	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 ASN Orang/Bulan	103.773.000.000	7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PLG	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 ASN Orang/Bulan	106.038.000.000	
8	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PLG	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 ASN, 85 Non ASN Dokumen	2.885.110.000	8	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PLG	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 ASN dan 85 Non ASN	2.885.110.000	
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PLG	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 org Bendahara, 1 orang PPK Dokumen	875.800.000	9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PLG	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 org Bendahara, 1 orang PPK Dokumen	875.800.000	
10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	PLG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10 dokumen	65.000.000	10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	PLG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10 dokumen	65.000.000	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PLG	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	150.000.000	11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PLG	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	150.000.000	
	12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	PLG Kab/Kota	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	10 Laporan dan 17 Kab/Kota Dokumen	403.400.000	12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	PLG & Kab/Kota	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	403.400.000	
	13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	PLG	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 laporan	155.000.000	13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	PLG	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	155.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14	Penyusunan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 laporan	50.000.000	14	Penyusunan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 laporan	50.000.000	
	iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		430.000.000	iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		430.000.000	
	15	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	55.000.000	15	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	55.000.000	
	16	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	15 Box, 21 Unit, 20 Dokumen	250.000.000	16	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	15 Box, 21 Unit, 20 Dokumen	250.000.000	
	17	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	55.000.000	17	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	55.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
18	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	PLG	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21 Unit Kendaraan Dinas	70.000.000	18	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	PLG	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21 Unit Kendaraan Dinas	70.000.000	
iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		95.000.000	iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		95.000.000	
19	Monitoring, dan Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	PLG	Jumlah Dokumen Monitoring, dan Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Laporan	95.000.000	19	Monitoring, dan Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	PLG	Jumlah Dokumen Monitoring, dan Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Laporan	95.000.000	
v	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		936.400.000	v	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		936.400.000	
20	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PLG	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	41 jenis paket	470.000.000	20	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PLG	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	41 jenis paket	470.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	21	PLG	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sosialisasi PPID Dokumen	466.400.000	21	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sosialisasi PPID Dokumen	466.400.000	
	vi		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.065.000.000	v	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.065.000.000	
	22	PLG	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 unit	1.455.000.000	22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	1.455.000.000	
	23	PLG	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1.610.000.000	23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	1 unit	1.610.000.000	
II			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		3.077.692.669.582	II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	APBD YANG TEPAT WAKTU		3.077.184.344.582	
	i		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		5.170.000.000	i	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		5.170.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	24	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	PLG	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 dokumen	360.000.000	24	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	PLG	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 dokumen	360.000.000
	25	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	PLG	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 dokumen	360.000.000	25	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	PLG	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 dokumen	360.000.000
	26	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	PLG	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	2 dokumen	300.000.000	26	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD		Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	2 dokumen	300.000.000
	27	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	PLG	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	2 dokumen	300.000.000	27	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	PLG	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	2 dokumen	300.000.000
	28	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	PLG	Jumlah Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD	100 Raperda Dokumen	1.200.000.000	28	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	PLG	100 Raperda Dokumen	Jumlah Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD	1.200.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
29	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	PLG	Jumlah Perda tentang Perubahan APBD dan Penjabaran Perubahan APBD	100 dokumen	1.150.000.000	29	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	PLG	Jumlah Perda tentang Perubahan APBD dan Penjabaran Perubahan APBD	100 dokumen	1.150.000.000	
30	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	PLG	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	1.500.000.000	30	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	PLG	Jumlah Perda yang dihasilkan	1 dokumen	1.500.000.000	
ii	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten /Kota		Persentase Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten /Kota		1.426.550.000	ii	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten /Kota		Persentase Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten /Kota		1.426.550.000	
31	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten /Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten /Kota	PLG	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten /Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten /Kota	17 laporan	520.000.000	31	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten /Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten /Kota	PLG	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten /Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten /Kota	17 laporan	520.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	32	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota	PLG	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota yang terlaksana	17 laporan	520.000.000	32	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota	PLG	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota yang terlaksana	17 laporan	520.000.000
	33	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota	PLG	Jumlah Raperda Pertanggungjawaban APBD	17 Raperda Laporan	386.550.000	33	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota	PLG	Jumlah Raperda Pertanggungjawaban APBD	17 Raperda Laporan	386.550.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
iii	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	PLG	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	12 dokumen	5.881.437.700	iii	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	12 laporan	5.373.612.700	
34	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	PLG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		564.250.000	34	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		56.425.000	
35	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	PLG	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	SMI Dokumen	4.326.187.700	35	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	SMI Dokumen	4.326.187.700	
36	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Transfer Lainnya	PLG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Transfer Lainnya	3 dokumen	155.000.000	36	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	3 dokumen	155.000.000	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	37	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	PLG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 dokumen	324.000.000	37	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	PLG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 dokumen	324.000.000
	38	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	PLG	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	41 OPD dokumen	512.000.000	38	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	PLG	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	41 OPD dokumen	512.000.000
	iv	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		1.832.830.000	iv	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		1.832.830.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	39	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	PLG	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	2 Buku dokumen	658.700.000	39	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	PLG	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	2 Buku dokumen	658.700.000
	40	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	PLG	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 laporan	588.600.000	40	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	PLG	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 laporan	588.600.000
	41	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	PLG	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	1 raperda dokumen	585.530.000	59	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	PLG	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	1 raperda dokumen	585.530.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	v	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		3.063.381.851.882	v	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		3.063.381.851.882	
	42	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	17 Kab/Kota	1.114.705.600.596	42	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	17 Kab/Kota	1.114.705.600.596	
	43	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	17 Kab/Kota	16.000.000.000	43	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	17 Kab/Kota	16.000.000.000	
	44	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	17 Kab/Kota	1.932.676.251.286	44	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	17 Kab/Kota	1.932.676.251.286	
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah		9.169.198.229	III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah		9.169.198.229	
	i	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah		9.169.198.229	i	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah		9.169.198.229	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	45	Penyusunan Standar Harga	PLG	Jumlah Standar yang disusun	1 dokumen	295.000.000	45	Penyusunan Standar Harga	PLG	Jumlah Standar yang disusun	1 dokumen	295.000.000
	46	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	PLG	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	41 laporan dokumen	50.000.000	46	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	PLG	Jumlah laporan RKBM yang disusun	41 laporan dokumen	50.000.000
	47	Penatausahaan Barang Milik Daerah	PLG	Jumlah Laporan Penata-usahaan Barang Milik Daerah	20 SK laporan	450.200.000	47	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	PLG	Jumlah Laporan Penata-usahaan Barang Milik Daerah	20 SK laporan	450.200.000
	48	Pengamanan Barang Milik Daerah	PLG	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	41 OPD laporan	3.042.000.000	48	Pengamanan Barang Milik Daerah	PLG	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	41 OPD laporan	3.042.000.000
	49	Penilaian Barang Milik Daerah	PLG	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	200 laporan	360.000.000	49	Penilaian Barang Milik Daerah	PLG	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	200 laporan	360.000.000
	50	Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	PLG	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Sertifikat, BPKB Laporan	2.558.660.832	50	Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	PLG	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Sertifikat, BPKB Laporan	2.558.660.832

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	51	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindah-tanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	PLG	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindah-tanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	8 SK dokumen	1.293.500.000	51	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan Pemindah tanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	PLG	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindah-tanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	8 SK dokumen	1.293.500.000
	52	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	PLG	Jumlah laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan BMD	1 laporan	769.837.397	52	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	PLG	Jumlah laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan BMD	1 laporan	769.837.397
	53	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	PLG	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 laporan	350.000.000	53	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	PLG	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 laporan	350.000.000
X	NON URUSAN											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				13.791.728.400							13.791.728.400
	i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			165.000.000							165.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				165.000.000					165.000.000	
ii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				883.843.000					883.843.000	
55	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	PLG	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	883.843.000	55	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	PLG	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	883.843.000
iii	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				653.250.000		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			653.250.000	
56	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	PLG	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 laporan	453.250.000	56	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	PLG	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 laporan	453.250.000
57	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PLG	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mendidikan dan Pelatihan	15 orang	200.000.000	57	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PLG	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mendidikan dan Pelatihan	15 orang	200.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
iv	Administrasi Umum Perangkat Daerah				8.897.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				8.897.000.000	
58	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PLG	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	mesin scanner dll paket	3.501.600.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PLG	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	mesin scanner dll Paket	3.501.600.000	
59	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PLG	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 jenis alat paket	2.450.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PLG	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 jenis alat paket	2.450.000.000	
60	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PLG	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	40 jenis paket	1.100.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PLG	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	40 jenis paket	1.100.000.000	
61	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	PLG	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang Disediakan	7 surat kabar dokumen	100.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	PLG	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang Disediakan	7 surat kabar dokumen	100.000.000	
62	Fasilitasi Kunjungan Tamu	PLG	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 laporan	270.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	PLG	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 laporan	270.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	63	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PLG	Jumlah Laporan Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 kali dalam daerah laporan	1.000.000.000	63	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PLG	Jumlah Laporan Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 kali dalam daerah laporan	1.000.000.000
	64	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PLG	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7 aplikasi dokumen	475.400.000	64	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PLG	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7 aplikasi dokumen	475.400.000
	v	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.552.800.000		v	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.552.800.000
	65	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PLG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 surat laporan	40.000.000	65	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PLG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 surat laporan	40.000.000
	66	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PLG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 rek listrik laporan	1.512.800.000	66	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PLG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 rek listrik laporan	1.512.800.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
vi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.639.835.400					1.639.835.400	
67	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PLG	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	21 Roda 4, 20 Roda 2 Unit	1.190.585.400	67 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PLG	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	21 Roda 4, 20 Roda 2 Unit	1.190.585.400	
68	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PLG	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya dan Perizinannya	21 Roda 4, 20 Roda 2 Unit	449.250.000	68 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PLG	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya dan Perizinannya	21 Roda 4, 20 Roda 2 Unit	449.250.000	
	Jumlah : 68 sub kegiatan				3.215.027.906.211	Jumlah : 68 sub kegiatan				3.216.085.081.211	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan inventarisasi usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat, dilakukan penyesuaian dengan nomenklatur program/kegiatan yang berlaku. Kemudian dilakukan penelitian kelengkapan informasi dari usulan, terutama mengenai jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi, dan besaran volume kegiatan, bila perlu dilakukan konfirmasi atau diberi catatan untuk dikonfirmasi dengan hasil analisis kebutuhan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan memeriksa apakah usulan program/kegiatan tersebut sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD. Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan disajikan dalam Tabel T-C.32 berikut:

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Provinsi Sumatera Selatan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Tercapainya penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		
	i. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PLG	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	
	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PLG	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	
	3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	PLG	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	
	4. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	PLG	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	
	5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PLG	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	
	6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PLG	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	
	ii. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	7. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PLG	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 ASN Orang/ Bulan	
	8. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PLG	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 ASN, 85 Non ASN Dokumen	
	9. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	PLG	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	3 Orang Bendahara, 1 Orang PPK Dokumen, 1 Orang Pembuat Daftar Gaji	

	10. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	PLG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10 Dokumen	
	11. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PLG	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	
	12. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	PLG Kab/Kota	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	10 Laporan dan 17 Kab/Kota Dokumen	
	13. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	PLG	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	
	14. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	PLG	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	
	iii. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
	15. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	PLG	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	41 Laporan	
	16. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	PLG	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	15 Box, 21 Unit, 20 Dokumen	
	17. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	PLG	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	
	18. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	PLG	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21 Unit Kendaraan Dinas	
	iv. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Adminsitasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
	19. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	PLG	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Laporan	
	v Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	20. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PLG	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Jenis Paket	
	21. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	PLG	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penilaian Audit Arsip dengan Kategori Baik BB	

	vi. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah		
	22. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PLG	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya	
	23. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PLG	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit Gedung Kantor, 3 Unit Rumah Dinas, 1 Gudang Arsip	
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		APBD yang Tepat Waktu		
	i. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		
	24. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	PLG	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	
	25. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	PLG	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	
	26. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	PLG	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	44 Dokumen	
	27. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	PLG	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	44 Dokumen	
	28. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	PLG	Jumlah Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	
	29. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	PLG	Jumlah Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	
	30. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	PLG	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	
	ii. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten /Kota		Persentase Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten /Kota		
	31. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Kab/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten /Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang terlaksana	17 Dokumen	

	32. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/ Kota	KAB/ KOTA	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten /Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD yang terlaksana	17 Dokumen	
	33. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten /Kota	PLG	Jumlah Raperda Pertanggungjawaban APBD	17 Raperda Laporan	
	ii. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		
	34. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	PLG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Laporan	
	35. Penatausahaan Pembiayaan Daerah	PLG	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	12 Dokumen Pencairan SMI	
	36. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	PLG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	3 Laporan	
	37. Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	PLG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	
	38. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	PLG	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	41 OPD Dokumen	
	iii. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		
	39. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	PLG	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	4 Buku Dokumen	

	40. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	PLG	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	
	41. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	PLG	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	1 Raperda Dokumen	
	iv. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		
	42. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	KAB/ KOTA	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	17 Kab/ Kota	
	43. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	KAB/ KOTA	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	17 Kab/ Kota Laporan	
	44. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	KAB/ KOTA	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	17 Kab/ Kota	
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah		
	v. Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah		
	45. Penyusunan Standar Harga	PLG	Jumlah Standar yang disusun	1 Dokumen	
	46. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	PLG	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	41 Laporan Dokumen	
	47. Penatausahaan Barang Milik Daerah	PLG	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	20 SK Penetapan	
	48. Pengamanan Barang Milik Daerah	PLG	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	41 OPD Laporan	
	49. Penilaian Barang Milik Daerah	PLG	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	50 Laporan	
	50. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	PLG	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Sertifikat, BPKB Laporan	

	51. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindah-tanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	PLG	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindah-tanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	18 SK Dokumen	
	52. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	PLG	Jumlah laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan BMD	120 BA, 4 Laporan Pelaksanaan Rekon BMD, 452 BA Rekon Dana BOS	
	53. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	PLG	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan BMD	
X	NON URUSAN				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	i. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	54. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	PLG	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	
	ii. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
	55. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	PLG	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	
	iii. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
	56. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	PLG	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Laporan	
	57. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PLG	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 orang	
	iv. Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	58. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PLG	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Jenis Paket	
	59. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PLG	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Jenis Paket	
	60. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PLG	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Jenis Paket	

	61. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PLG	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Surat Kabar Dokumen	
	62. Fasilitasi Kunjungan Tamu	PLG	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	
	63. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PLG	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 kali Dalam Daerah Laporan	
	64. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PLG	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7 Aplikasi Dokumen	
	v. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	65. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PLG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Surat Laporan	
	66. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PLG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Rek Listrik Laporan	
	vi. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	67. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PLG	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 Unit Roda 4, 19 Unit Roda 2	
	68. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PLG	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit Roda 4	
Jumlah : 68 sub kegiatan					

Usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang disajikan pada tabel diatas mencakup 3 (tiga) program dan 1 (satu) program non urusan. Program dan kegiatan memiliki indikator kinerja, yaitu tiap program memiliki *outcome* dan kegiatan memiliki *output* yang dapat dilihat dari tabel diatas. Terlihat dengan adanya *output* yang dicapai maka Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan akan terwujud.

Usulan program tersebut yaitu:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Terdiri dari kegiatan:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan *Sub Kegiatan* :
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 4. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan *Sub Kegiatan* :
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 6. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
 8. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan *Sub Kegiatan* :
 1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 3. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 4. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan *Sub Kegiatan* :
 - 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - 2. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan *Sub Kegiatan* :
 - 1. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Terdiri dari *kegiatan*:

- a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, dengan *Sub Kegiatan* :
 - 1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
 - 2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - 3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
 - 4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
 - 5. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
 - 6. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
 - 7. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
- b. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan *Sub Kegiatan* :
 - 1. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
 - 2. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/ Kota
 - 3. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten /Kota

- c. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, dengan *Sub Kegiatan* :
 - 1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
 - 2. Penatausahaan Pembiayaan Daerah
 - 3. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
 - 4. Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
 - 5. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemetongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
- d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, dengan *Sub Kegiatan* :
 - 1. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban
 - 2. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 3. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi
- e. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan *Sub Kegiatan* :
 - 1. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
 - 2. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
 - 3. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi

III. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Hanya terdiri dari kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan *Sub Kegiatan* :

- 1. Penyusunan Standar Harga
- 2. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
- 3. Penatausahaan Barang Milik Daerah
- 4. Pengamanan Barang Milik Daerah
- 5. Penilaian Barang Milik Daerah
- 6. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah

7. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
8. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
9. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

IV. NON URUSAN (PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI)

Terdiri dari kegiatan:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan *Sub Kegiatan* Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- b. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang, dengan *Sub Kegiatan* Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan *Sub Kegiatan* :
 1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah yang, dengan *Sub Kegiatan* :
 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 5. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 7. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan *Sub Kegiatan* :
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan *Sub Kegiatan* :
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja (Rencana Kerja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mudah harus terukur dan kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa yang akan datang.

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Tahun 2024-2026, merupakan pelaksanaan periode keempat (Tahap ke-IV) dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025. Visi RPJPD Provinsi Sumatera Selatan adalah **“Sumatera Selatan Unggul dan Terdepan Tahun 2025”**.

Untuk mendorong tercapainya visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, maka peran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan fungsi yaitu, perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjawab Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 diuraikan pada tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

Tujuan (1)	Sasaran (2)		Indikator Sasaran (3)	Target Kinerja Sasaran pada Tahun			
	1.1.1	1.1.2		2024 (5)	2025 (6)	2026 (7)	2027 (8)
1.1 Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang berkualitas			a. Penetapan Perda dan Pergub APBD yang tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
			b. Budget Execution: Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total Dalam APBD	-5% s.d 0%	-5% s.d 0%	-5% s.d 0%	-5% s.d 0%
			a. Persentase dokumen pencairan yang baik sesuai dengan aturan (Sisdur) dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%
			a. Persentase kesesuaian antara aset lancar dan aset tetap dan catatan atas laporan keuangan dan bukti dokumen	WTP	WTP	WTP	WTP
			1.1.3 Pelaporan Keuangan yang Baik				

Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun				
	(1)	(2)		(3)	2024 (5)	2025 (6)	2026 (7)	2027 (8)
	1.1.4	Pengelolaan Aset Yang Baik	a. b.	Asset Management Persentase Aset tercatat dan terinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku	100%	100%	100%	100%
1.2	1.2.1	APBD Kabupaten/Kota yang Baik	a.	Persentase APBD Kab/Kota yang tepat waktu dan benar	100%	100%	100%	100%
	1.2.2	Persentase Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/ Kota yang Baik	b.	Laporan Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Dalam rangka terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan menciptakan kehandalan laporan keuangan dan pengamanan aset daerah dan menciptakan pelayanan prima bidang keuangan daerah dan aset daerah melalui peningkatan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka telah disusun rencana program kerja tahun 2024 sebanyak 3 (tiga) program dan 1 (satu) program non urusan yaitu:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
- b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- d. Non Urusan (Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi).

Penjabaran dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Sumatera Selatan yaitu:

Usulan program tersebut yaitu:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Terdiri dari kegiatan:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan *Sub Kegiatan* :
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 4. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan *Sub Kegiatan* :
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 6. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
 8. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan *Sub Kegiatan* :
1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 3. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 4. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan *Sub Kegiatan* Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan *Sub Kegiatan* :
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan *Sub Kegiatan* :
1. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Terdiri dari kegiatan:

- a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, dengan *Sub Kegiatan* :
 1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
 2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
 4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
 5. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
 6. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
 7. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
- b. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan *Sub Kegiatan* :
 1. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
 2. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/ Kota
 3. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten /Kota
- c. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, dengan *Sub Kegiatan* :
 1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
 2. Penatausahaan Pembiayaan Daerah
 3. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

4. Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
 5. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait
- d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, dengan *Sub Kegiatan* :
1. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban
 2. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 3. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi
- e. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan *Sub Kegiatan* :
1. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
 2. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
 3. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi

III. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Hanya terdiri dari kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan *Sub Kegiatan* :

1. Penyusunan Standar Harga
2. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
3. Penatausahaan Barang Milik Daerah
4. Pengamanan Barang Milik Daerah
5. Penilaian Barang Milik Daerah
6. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
7. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahan-tanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
8. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
9. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

IV. NON URUSAN (PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI)

Terdiri dari *kegiatan*:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan *Sub Kegiatan* Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- b. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang, dengan *Sub Kegiatan* Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan *Sub Kegiatan* :
 1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah yang, dengan *Sub Kegiatan* :
 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 5. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 7. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan *Sub Kegiatan* :
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan *Sub Kegiatan* :
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Tabel 4.1
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2025 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KELUARAN SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			119.004.122.433				130.904.534.676
5 02 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.444.000.000				1.588.400.000
5 02 01 1.01 0001	Penyusunan Perencanaan Daerah	Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan Daerah	Dokumen Perangkat Daerah	PLG		2 Dokumen	126.500.000
5 02 01 1.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PLG		1 Dokumen	134.750.000
5 02 01 1.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD	PLG		1 Dokumen	140.250.000
5 02 01 1.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD	PLG		1 Dokumen	140.250.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5 02 01 1.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PLG	140.000.000	PAD		1 Laporan	154.000.000
5 02 01 1.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PLG	811.500.000	PAD		8 Laporan	892.650.000
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			108.386.047.000	PAD			119.224.651.700
5 02 01 1.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	PLG	103.767.200.000	PAD		110 ASN Orang/Bulan	114.143.920.000
5 02 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PLG	2.909.647.000	PAD		5 ASN, 85 NON ASN Dokumen	3.200.611.700
5 02 01 1.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PLG	885.800.000	PAD		3 org bend, 1 org PPK Dokumen	974.380.000
5 02 01 1.02 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	PLG	65.000.000	PAD		10 Dokumen	71.500.000
5 02 01 1.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PLG	150.000.000	PAD		1 Dokumen Laporan	165.000.000
5 02 01 1.02 0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	PLG	403.400.000	PAD		10 Lap, 17 Kab/Kota Dokumen	443.740.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5 02 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	PLG	155.000.000	PAD		3 Laporan	170.500.000
5 02 01 1.02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	PLG	50.000.000	PAD		1 Laporan Dokumen	55.000.000
5 02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			450.000.000	PAD			495.000.000
5 02 01 1.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	PLG	55.000.000	PAD		1 Laporan Dokumen	60.500.000
5 02 01 1.03 0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	PLG	270.000.000	PAD		15 Box, 21 Unit, 20 Dokumen	297.000.000
5 02 01 1.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	PLG	55.000.000	PAD		1 Laporan	60.500.000
5 02 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	PLG	70.000.000	PAD		21 Unit Kendaraan Dinas Laporan	77.000.000
5 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			730.000.000	PAD			803.000.000
5 02 01 1.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	PLG	600.000.000	PAD		100% Paket	660.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5 02 01 1.05 0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	PLG	130.000.000	PAD		12 Laporan Dokumen	143.000.000
5 02 01 1.06	Administrasi Perangkat Daerah Umum			5.691.465.250	PAD			6.260.611.775
5 02 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	PLG	500.000.000	PAD		41 Jenis Paket	550.000.000
5 02 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	PLG	3.501.600.000	PAD		Mesin Scanner dll Paket	3.851.760.000
5 02 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	PLG	1.260.000.000	PAD		40 Jenis Paket	1.386.000.000
5 02 01 1.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	PLG	429.865.250	PAD		Sosialisasi PPID Dokumen	472.851.775
5 02 01 1.09	Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.302.610.183	PAD			2.532.871.201
5 02 01 1.09 0006	Peneliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	PLG	1.200.088.472	PAD		10 Unit	1.320.097.319
5 02 01 1.09 0009	Peneliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	PLG	1.102.521.711	PAD		1 Unit	1.212.773.882
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			3.475.371.498.547	PAD			3.822.963.648.402

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5 02 02 1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			5.428.047.000	PAD			6.025.851.700
5 02 02 1.01 0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	PLG	410.000.000	PAD		2 Dokumen	451.000.000
5 02 02 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	PLG	410.000.000	PAD		2 Dokumen	451.000.000
5 02 02 1.01 0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	PLG	300.000.000	PAD		2 Dokumen	330.000.000
5 02 02 1.01 0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	PLG	300.000.000	PAD		2 Dokumen	330.000.000
5 02 02 1.01 0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	PLG	1.200.000.000	PAD		100 Raperda Dokumen	1.320.000.000
5 02 02 1.01 0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	PLG	1.150.000.000	PAD		100 Dokumen	1.320.000.000
5 02 02 1.01 0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Regulasi Kebijakan Anggaran Dokumen serta Bidang	PLG	1.658.047.000	PAD		1 Dokumen	1.823.851.700

1		2		3		4		5		6		7		8		9		
5	02	02	1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota					2.140.581.650									2.354.639.815
5	02	02	1.02	0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	PLG	872.664.000	PAD					17	Laporan		959.930.400	
5	02	02	1.02	0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	PLG	881.367.650	PAD					17	Laporan		969.504.415	
5	02	02	1.02	0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota	PLG	386.550.000	PAD					1	Raperda Laporan		425.205.000	
5	02	02	1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					5.628.140.700	PAD								6.190.954.770
5	02	02	1.03	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	PLG	790.850.000	PAD					12	Dokumen		869.935.000	
5	02	02	1.03	0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	PLG	3.276.187.700	PAD						SMI Dokumen		3.603.806.470	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5 02 02 1.03 0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	PLG	290.968.000	PAD		3 Dokumen	320.064.800
5 02 02 1.03 0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	PLG	553.510.000	PAD		1 Dokumen	608.861.000
5 2 02 1.03 0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	PLG	716.625.000	PAD		41 OPD Dokumen	788.287.500
5 02 02 1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			1.832.830.000	PAD			2.016.113.000
5 02 02 1.04 0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	PLG	658.700.000	PAD		2 Buku Dokumen	724.570.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5 02 02 1.04 0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	PLG	588.600.000	PAD		1 Laporan	647.460.000,00
5 02 02 1.04 0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	PLG	585.530.000	PAD		1 Raperda Dokumen	644.083.000,00
5 02 02 1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			3.460.341.899.197	PAD			3.806.376.089.117
5 02 02 1.05 0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	KAB/ KOTA	1.128.845.022.509	PAD		17 Kab/Kota Laporan	1.241.729.524.760
5 02 02 1.05 0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	KAB/ KOTA	16.000.000.000	PAD		17 Kab/Kota Laporan	17.600.000.000,00
5 02 02 1.05 0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	KAB/ KOTA	2.315.496.876.688	PAD		17 Kab/Kota Laporan	2.547.046.564.357
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			8.685.704.146	PAD			9.424.924.561
5 02 03 1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah			8.685.704.146	PAD			9.424.924.561

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5 02 03 1.01 0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	PLG	847.850.000	PAD		1 Dokumen	932.635.000
5 02 03 1.01 0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	PLG	50.000.000	PAD		41 Laporan Dokumen	55.000.000
5 02 03 1.01 0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah	PLG	305.237.397	PAD		20 SK Laporan	335.761.137
5 02 03 1.01 0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	PLG	2.739.000.000	PAD		41 OPD Laporan	3.012.900.000
5 02 03 1.01 0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	PLG	360.000.000	PAD		200 Laporan	396.000.000
5 02 03 1.01 0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	PLG	1.825.316.749	PAD		Sertifikat, BPKB Laporan	2.007.848.424
5 02 03 1.01 0010	Optimalisasi Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	PLG	1.293.500.000	PAD		8 SK Dokumen	1.293.500.000
5 02 03 1.01 0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	PLG	954.800.000	PAD		1 Laporan	1.050.280.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5 02 03 1.01 0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	PLG	310.000.000	PAD		1 Laporan	341.000.000
X	NON URUSAN			8.960.228.400	PAD			9.856.251.240
X XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			8.960.228.400	PAD			9.856.251.240
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			8.960.228.400	PAD			9.856.251.240
X XX 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			122.500.000	PAD			134.750.000
X XX 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	PLG	122.500.000	PAD		Dokumen	134.750.000
X XX 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			883.843.000	PAD			972.227.300
X XX 01 1.03 0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	PLG	883.843.000	PAD		1 Laporan	972.227.300
X XX 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			598.250.000	PAD			658.075.000,00
X XX 01 1.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	PLG	448.250.000	PAD		3 Laporan Dokumen	493.075.000,00
X XX 01 1.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	PLG	150.000.000	PAD		15 Orang	165.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
X XX 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.163.000.000	PAD			4.579.300.000
X XX 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	PLG	2.300.000.000	PAD		10 Jenis Alat Pem Paket	2.530.000.000
X XX 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	PLG	100.000.000	PAD		7 Surat Kabar Dokumen	110.000.000
X XX 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	PLG	270.000.000	PAD		0 Laporan	297.000.000
X XX 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PLG	900.000.000	PAD		150 Kali Dalam Daerah Laporan	990.000.000
X XX 01 1.06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PLG	593.000.000,0	PAD		7 Aplikasi Dokumen	652.300.000
X XX 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.552.800.000	PAD			1.708.080.000
X XX 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PLG	40.000.000	PAD		1000 Surat Laporan	44.000.000
X XX 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	PLG	1.512.800.000	PAD		4 Rek Listrik Laporan	1.664.080.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
X XX 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.639.835.400	PAD			1.803.818.940
X XX 01 .09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	PLG	1.190.585.400	PAD		21 Roda 4, 20 Roda 2 Unit	1.309.643.940
X XX 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	PLG	449.250.000	PAD		21 Roda 4, 20 Roda 2 Unit	494.175.000
TOTAL				3.612.021.553.526				3.973.149.358.879

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024, merupakan rencana kerja tahunan yang disusun untuk menjabarkan Rencana Strategis BPKAD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026, dan dalam rangka mendukung tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah, target dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025. Selain itu, Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah juga merupakan dokumen perencanaan tahunan yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam menentukan arah dan rencana ke depan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta kemampuan sumber daya dan pembiayaan yang berasal dari APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sebagai salah satu sarana tata kelola organisasi yang dapat dipergunakan untuk:

- a. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan serta menjaga konsistensi perencanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta anggaran dengan pelaksanaan terhadap dokumen perencanaan;
- b. Menentukan indikator kinerja dan tingkat capaian strategis dan merencanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;
- c. Mengalokasikan anggaran untuk mendukung target capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah disusun;
- d. Melakukan verifikasi dan pendampingan kepada para pengelola keuangan mulai dari penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan, perencanaan anggaran, penatausahaan dan pelaporan;
- e. Melakukan koordinasi dan membangun komunikasi antar pegawai, antar unit (Sekretariat dan bidang) dan antar perangkat daerah, sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan dengan lebih cepat dan tepat;

Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 telah disusun dengan program, kegiatan, sub kegiatan pada masing-masing unit (sekretariat dan bidang-bidang). Apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan :

- a. Menghitung kembali kebutuhan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Melakukan pergeseran belanja untuk program prioritas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. Merumuskan kembali target capaian program, kegiatan sebagai akibat ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;

Dengan mensinergikan berbagai aspek yang ada, maka diharapkan dapat menunjang dan memperkuat kemampuan dalam melakukan pengelolaan keuangan dan aset daerah agar bisa terwujud secara maksimal dan mampu menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah provinsi Sumatera Selatan yang transparan dan akuntabel sehingga opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dapat terwujud.